

WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADITS

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

RIZKA VERAWATI

NPM. 1331030078

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1441 H/ 2020 M

WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADITS

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

RIZKA VERAWATI

NPM. 1331030078

Jurusan: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Dr. Ahmad Isnaeni, M. A

Pembimbing II : Dr. Siti Badiyah, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441 H/ 2020 M

ABSTRAK
WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADITS

Oleh:
Rizka Verawati

Pernikahan sebagai dasar pembentuk suatu keluarga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari institusi ini melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam hukum Islam telah diatur bagaimana persyaratan agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah, salah satunya adalah harus adanya seorang wali. Kajian ini berfokus pada hukum Islam berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW tentang wali dalam pernikahan *laa nikaha illa bi waliyiin*. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana makna kandungan dari hadits Nabi SAW *laa nikaha illa bi waliyiin* tentang wali nikah dan bagaimana implikasi hukum dari hadits tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dan menganalisa makna dari kandungan hadits Nabi SAW *laa nikaha illa bi waliyiin* tentang wali nikah dan menjelaskan bagaimana implikasi hukumnya terhadap pernikahan. Penelitian mengenai wali nikah menurut hadits Nabi Muhammad SAW ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian murni atau penelitian kepustakaan (*Library reseach*) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik dalam menganalisa data adalah dengan deskriptif analisis dan analisis kontekstual. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara penganalisisan terhadap suatu obyek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa substansi yang menjadi kandungan dari hadits ini adalah tentang wajibnya wali bagi seorang perempuan dalam pernikahan, sehingga pernikahan dianggap batal mana kala tidak ada wali yang mengakadkannya. Dalam hadits ini sama sekali tidak memberikan justifikasi bahwa wali memiliki hak untuk memveto (*Ijbar*) dalam term fiqih seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang tidak disenanginya. Hak veto yang diperuntukkan bagi seorang wali hanya diperbolehkan dalam hal-hal tentu seperti bagi seorang perempuan yang dianggap tidak cakap sehingga dalam hal ini tidak lagi dibedakan antara perawan dan janda seperti dikenal dalam kitab-kitab fiqh melainkan harus dibedakan berdasarkan tingkat kecakapannya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Verawat

NPM : 1331030078

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Judul Skripsi : Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits

Menyatakan bahwa karya tulis saya dengan judul “ Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits” adalah benar hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan plagiat atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas etika akademik dalam karya saya ini, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 10 November 2020

RIZKA VERAWATI

Npm. 1331030078



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703531780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Wali Nikah dalam Perspektif Hadits**
Nama Mahasiswa : **Rizka Verawati**
NPM : **1331030078**
Prodi : **Ilmu Al-Quran dan Tafsir**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah di
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Dr. Ahmad Isnaeni, M. A
NIP. 197403302000031001

Pembimbing II

Dr. Siti Badiah, M. Ag
NIP. 197712252003122001

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Drs. Ahmad Bastari M. A
NIP. 196111013199091101



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Letkol IL Endro Surarmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703331780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HADITS"**

disusun oleh **Rizka Verawati, NPM 1331030078**, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan

Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi

Agama pada Hari/Tanggal: **Jumat, 20 November 2020.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Dr. Abdul Malik Ghazali, Lc, MA**

Sekretaris : **Gesit Yudha, M.LP**

Penguji I : **Ahmad Muttaqin M.Ag**

Penguji II : **Dr. Ahmad Isaeni, MA**

Penguji III : **Dr. Siti Badi'ah, M.Ag**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. H.M Afif Ansori, MA
NIP. 196003131989031004

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan Hakim menjadi wali bagi
orang yang tidak memiliki wali*

PERSEMBAHAN

Saya sangat menyadari hidup bukan lomba lari, terlepas cepat atau lambat saya menyelesaikan studi bagi saya semua sudah sesuai porsi waktu yang tepat. Teruntuk semua proses yang telah kulalui terimakasih kusampaikan, dan teruntuk diri yang selalu tangguh kubisikan pelan “kamu hebat”. Dan dengan penuh rasa syukur tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Malaikat tak bersayapku, Ayahanda Miskun dan Ibunda Enny Riyatun yang begitu romantis mengasihi anak-anaknya. Ayah dan Ibu tercinta dengan menyelesaikan skripsi ini satu dari tanggung jawab saya telah tertunaikan, yakni menyelesaikan yang telah dimulai.
2. Teruntuk saudaraku Ferina Rizky Anugerah Wati, Annisa Nurul Fadillah, dan satu-satunya adik lelakiku Aji Akbar Wibowo semoga kita selalu bergandeng tangan saling menguatkan.
3. Terimakasih untuk lelaki yang tiada lelah menemani perjalananku, ku mohon dengan segala harap agar kau selalu menetap, disini disampingku. Aku sangat butuh kau dan aminmu, untuk semoga-semoga kita yang baik.
4. Dan teruntuk abang sekaligus guruku, bang Tajudin Nur, M.Sos dan bang Ahmad Hadi Mustoleh, S.Ag (Aam) yang tiada lelah mendidik dan mengkader saya, semoga ilmu dari abang berkah dalam hidup saya, maafkan jika adikmu masih bandel.
5. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ana Yunita Pratiwi, David Rifai, Rista, Marzuki, Erfin Mahmudah, Eli Nursusanti, dan

Siti Fatimah terimakasih telah kebersamai prosesku. Dan teruntuk adik-adik ideologisku selamat menikmati proses kalian.

6. Untuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, dan segenap dosen serta birokrasi yang telah membantu saya, ku haturkan terimakasih.

Bandar Lampung, 10 November 2020

RIZKA VERAWATI

Npm. 1331030078

RIWAYAT HIDUP

Rizka Verawati, atau yang akrab disapa Rizka adalah putri kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Miskun dan Ibunda Enny Riyatun. Lahir di Ogan Komering Ulu Timur, 01 Agustus 1995.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri Karang Binangun lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama 1 Belitang Madang Raya lulus tahun 2010 lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas LPB Belitang lulus tahun 2013. Dan pada tahun 2013 penulis mendaftarkan diri pada Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sekarang telah beralih menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diorganisasi intra maupun ekstra diantaranya; Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin tahun 2014-2015, Anggota Koperasi Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014-2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016-2017, Anggota Bidang Kaderisasi Korps PMII Putri (KOPRI) Pengurus Koordinator Cabang Lampung tahun 2017-2019.

Selalu berpegang teguh dengan prinsip ketika telah menyelesaikan studi tidak ingin melamar pekerjaan, membuat penulis aktif dan menggeluti bidang wirausaha. Kecintaannya pada bidang wirausaha, dibuktikan dengan tahun 2019 penulis mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Tungga Dewi. Harapan

penulis Tungga Dewi akan menebar manfaat. Dan tahun 2020 penulis launching sebuah toko kosmetik yang diberi nama Tungga Dewi Cosmetics.

Bandar Lampung, 10 November 2020

RIZKA VERAWATI

Npm. 1331030078

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah swt atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw, yang menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Penulisan skripsi ini dapat selesai dengan lancar tidak lepas oleh bantuan berbagai pihak, untuk itu saya menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. H. M. Afif Ansori, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Ahmad Isnaeni MA selaku pembimbing I dan Hj. Siti Badi'ah, M.Ag penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan serta kebijaksanaanya meluangkan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Drs. Ahmad Bastari MA selaku ketua prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Intan Islamia, S.Si, M.Sc selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Quran dan

Tafsir, dan beserta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan didikan dan pelayanan pada penulis.

5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam pencarian literature dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan amal shalih.

Bandar Lampung, 10 November 2020

RIZKA VERAWATI

Npm. 1331030078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Mengenai *Transliterasi* Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman SuratKeputusan Bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	م	M
ب	B	ر	R	ع	‘ (materbalik di atas)	ن	N
ت	T	ز	Z			و	W
ث	Ts	س	S	غ	Gh	ه	H
ج	J	ش	Sy	ف	F	ء	‘ (Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ح	H	ص	Sh	ق	Q		
خ	Kh	ض	Dh	ك	K		
د	D	ط	Th	ل	L	ي	Y

2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal Panjang		Contoh	Vokal Rangkap	
ـَ	A	جَدَل	ا	Ā	سَارَ	يْ....	Ai
ـِ	I	سَنِ	ي	Î	قَيْلَ	وْ....	Au
ـُ	U	ذُكِرَ	و	Û	يَجُورَ		

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na'im.

4. Syaddah dan Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-Syamsu.¹

¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, (Lampung: Iain Raden Intan 2014), h. 20-21

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	12

BAB II TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah dalam Islam	18
B. Syarat-syarat Wali Nikah dalam Islam	22
C. Macam-macam Wali Nikah dalam Islam	25
D. Kedudukan Wali Nikah dalam Islam.....	30
E. Orang-orang Yang Berhak Menjadi Wali.....	35
F. Fungsi Wali dalam Islam	37

BAB III HADITS-HADITS TENTANG WALI NIKAH

A. Metode Memahami Hadits.....	39
B. Takhrij Hadits	42
C. Materi dan Kandungan Matan Hadits	48
D. Kandungan Matan Hadits Tentang Wali	49

BAB IV ANALISA TENTANG HADITS WALI NIKAH

A. Analisa Tekstual Hadits	58
B. Analisa Historis Perwalian Dalam Pernikahan	66
C. Implikasi Hukum	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan seperlunya. Adapun judul skripsi ini yaitu “*Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits*”. Dalam judul ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

Kata wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.¹ Perwalian dari bahasa Arab yaitu *walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.²

Menurut Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.³ Wali merupakan pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁴ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu wewenang atau kekuasaan *syar’i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁵

¹ Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 92.

² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 90.

⁴ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 165.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera. 2001), h. 345.

Nikah artinya terkumpul dan menyatu. Menurut Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, secara bahasa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikan nikah sebagai percampuran.⁶ Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, dikarenakan ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena perempuan dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga kemudian dibutuhkan wali nikah untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, perspektif adalah penglihatan yang menembus.⁷ Dengan demikian perspektif adalah cara memandang atau sudut pandang seseorang terhadap permasalahan yang sedang diteliti atau yang sedang mereka kerjakan, yaitu bermaksud memberi gambaran yang jelas, sehingga ditemukan suatu tujuan yang dimaksud.

Hadits berasal dari bahasa Arab yaitu *haddatsa*, yang berarti *al-jaddid* (yang baru), lawan dari *Al-Qadim* (yang lama), artinya menunjukan kepada waktu yang dekat atau singkat. *al-qarib* (yang dekat: yang belum lama terjadi), seperti

⁶ Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita* terj. M Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar cet. 10, 2002), h. 375.

⁷ Hasan Shadili, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ich Tiar Baru Van Hove, 1984), h. 2687.

kata: *هو جد يد العهد بالاسلم* (dia orang baru memeluk agama Islam), al-khabar (berita).⁸ Secara etimologis, kata hadis berarti (lughawiyah), berarti komunikasi, kisah, percakapan: religius atau sekuler, historis atau kontemporer. Apabila digunakan sebagai kata sifat, hadits berarti baru.⁹ Sedangkan pengertian hadits menurut sebagian *muhaddisin* adalah “Segala apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW, meliputi perkataan, perbuatan, taqrir ataupun sifat Nabi”.¹⁰

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menguraikan, memaparkan, menganalisis hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan masalah wali, akan tetapi peneliti akan memfokuskan kajian skripsi ini pada hadits Nabi Muhammad SAW tentang wali, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang hadits di atas, yakni tentang bagaimanakah kandungan makna hadits tersebut, dan bagaimana implikasi hukumnya.

B. Alasan Memilih Judul

Hal yang menjadi alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Judul ini mempunyai signifikansi yang sangat urgen terkait dengan masalah wali, karena diakui atau tidak semakin berkembangnya

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1994), h. 1.

⁹ M.M Azami, *Memahami Ilmu Hadits*, (Jakarta, Penerbit Lentera, 2003), h. 21.

¹⁰ Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 27.

teknologi maka semakin berkembangnya tingkah laku manusia, serta semakin banyak permasalahan sosial yang muncul juga, salah satunya dalam masyarakat banyak anak muda yang melakukan kawin lari akibat tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. Yang menjadi permasalahan dalam agama adalah siapakah walinya, bolehkah melakukan pernikahan tanpa ada dan tanpa seizin walinya, lalu bagaimana implikasi hukum nikahnya tersebut. Tentunya hal ini harus mendapat atensi yang serius dan solusi hukum yang tepat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam prespektif hadits.

2. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sehingga dapat menambah wawasan keilmuan di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, selain itu dengan literatur yang cukup memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.


C. Latar Belakang

Aristoteles seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu hakikatnya manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga.

Pernikahan sebagai dasar pembentuk suatu keluarga merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari institusi ini melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai pernikahan. *Pertama*, menurut madzhab Syafi'iyah, nikah adalah melakukan perjanjian perikatan atau akad dalam arti sebenarnya (hakiki) dan juga berarti “untuk berhubungan kelamin” dalam arti tidak sebenarnya (majazi). *Kedua*, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa nikah mengandung makna hakiki untuk berhubungan kelamin dan makna majazi yang berarti akad. *Ketiga*, menurut madzhab Hanbali nikah dengan dua kemungkinan arti kata tersebut (akad dan hubungan kelamin) adalah arti yang sebenarnya.

Apabila menikah memiliki artian hubungan kelamin, maka hal ini dirasa cara yang sangat tepat untuk menjauhi perzinaan sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Isra ayat 32:

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS: Al-Isra ayat 32)

Ulama pada zaman dahulu memandang pernikahan hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang pada awalnya dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, sebab, dan akibat dari pernikahan. Tujuan dari sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Hal ini seperti

yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS: Ar-Rum ayat 21)

Pernikahan juga merupakan proses melanjutkan keturunan seperti yang tertuang dalam An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (QS: An-Nahl ayat 72)

Pernikahan tidak hanya diatur dalam hukum Islam, namun juga diatur dalam hukum negara. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja turut mengatur tentang pernikahan. Undang-Undang pernikahan yang terdapat pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan disebutkan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, sebagaimana sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pernikahan mempunyai hubungan erat antara hukum negara dengan hukum agama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jadi, pernikahan semestinya harus memenuhi beberapa unsur hukum pernikahan yakni hukum agama dan hukum negara serta biasanya tak lepas juga dari hukum adat. Dalam kultur masyarakat Indonesia, hukum agama dan hukum adat merupakan relasi yang kuat, karena pernikahan akan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaan termasuk didalamnya adalah adat. Pernikahan dianggap sakral dan perlu restu dari masyarakat dalam hal ini keluarga atau wali nikah.

Tidak jarang persoalan adat juga dapat menjerat laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan. Perbedaan adat biasanya memicu pihak dari orang tua tak merestui anaknya untuk menikah dengan calon suami/isteri yang berlainan adat. Hal-hal yang seperti ini yang menimbulkan keresahan antara

laki-laki dan perempuan, dimana mereka sudah saling jatuh cinta namun kedua orang tuanya tak merestui. Biasanya tak ada pilihan bagi mereka selain melakukan kawin lari atau dalam masyarakat Lampung sering disebut dengan *sebambangan*.

Ketika hal tersebut terjadi, maka tentu saja akan merugikan mereka sendiri, terutama dari sisi perempuan, karna pada dasarnya menikah diharuskan adanya wali sebagaimana sesuai sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal”
(HR. at-Tirmizi no. 1102 kitab an-Nikaah)

Dari fenomena yang terjadi pada era sekarang ini, serta dengan memperhatikan ayat dan hadits diatas dalam hal menyikapi kasus pernikahan yang tidak melibatkan wali, maka perlu diadakan sebuah penelitian terkait dengan masalah wali, sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kandungan makna hadits tentang wali dan bagaimana implikasinya. Adapun hadits yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kandungan makna hadits لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
2. Bagaimanakah implikasi hukum hadits لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka lebih memahami apa makna yang terkandung dalam hadits لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.
2. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kandungan hadits لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ dan implikasi hukumnya.
3. Sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan pemikiran umat Islam terkait dengan masalah wali di dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

2. Dilihat dari problem masalah wali saat ini, khususnya yang terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dapat digunakan bagi pengembangan ilmu-ilmu agama dalam kajian wali kedepan.

F. Tinjauan Pustaka

Pada era sekarang, tentunya sebuah penelitian karya ilmiah bukanlah hal baru lagi meskipun ada penelitian dengan judul yang baru, mau tidak mau harus diakui bahwa penelitian karya ilmiah itu bukanlah hal baru, akan tetapi lantas tidak dijadikan alasan untuk kita berhenti dan tidak mau menulis karya baru, karena meski sama tetap saja akan ada sisi yang berbeda, seperti halnya dengan penelitian skripsi ini yang berjudul, “*Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits*”. Kajian tentang wali bukanlah hal baru, pada peneliti sebelumnya telah lebih dulu diteliti oleh seorang yang lebih dulu, diantara judul dan penelitian yang telah ada adalah:

1. Skripsi karya Dimas Ayuni yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam*” tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat di Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah terhadap pernikahan dengan wali hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah dalam penelitian ini membahas tentang pandangan suatu masyarakat terhadap pernikahan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang wali nikah dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Skripsi karya Ahmad Syaiful Huda yang berjudul “*Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim* (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)” tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Batealit Jepara dalam kurun waktu dari bulan Januari-Juli 2015 terdapat 16 pernikahan dengan wali hakim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini fokus kajiannya yaitu tentang pernikahan dengan wali hakim, sedangkan dalam penelitian sebelumnya fokus kajiannya adalah mengkaji hadis Nabi SAW tentang pernikahan dengan wali serta implikasi hukum dari hadis tersebut.
3. Skripsi karya Inggit Fitriani yang berjudul “*Pernikahan Dengan Wali Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Desa Tanjung Tirta Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang sesuai dan dianggap sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini memfokuskan masalahnya pada seseorang PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang tidak mempunyai hak dan wewenang dari Pengadilan Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, sedangkan dalam penelitian yang sebelumnya memfokuskan pada masalah pernikahan dalam hukum Islam, yaitu wali dalam perspektif hadis Nabi serta implikasi hukum dari hadis Nabi tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian mengenai wali menurut hadits Nabi Muhammad SAW ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bukanlah penelitian lapangan, melainkan merupakan penelitian murni atau penelitian kepustakaan (*Library reseach*).

1. Sumber data

Dalam melakukan pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber primer, yaitu sumber informasi yang secara langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap pengumpulan dan penyimpanan data. Sumber semacam ini dapat disebut juga dengan data atau informasi dari satu orang ke orang lain.¹¹ Adapun sumber primer kajian ini adalah kitab hadits (*kutubutis'ah*) yang memuat hadits-hadits wali dengan lafadz لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai tanggung jawab dan wewenang terhadap informasi yang ada padanya atau suatu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, artikel

¹¹ Muhamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 42.

dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Seperti diketahui bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literatur yang mempunyai relevansi terhadap tema pembahasan. Sedangkan instrumen pengumpulan terhadap data-data tersebut dengan menggunakan dokumentasi.

Adapun sebelum melakukan pengumpulan terhadap data-data yang dibutuhkan, terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang dapat dijadikan sebagai objek telaah dalam penelitian, dan dilanjutkan dengan upaya pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun sumber sekunder, dengan menghimpun hadits-hadits yang mempunyai tema yang sejenis dengan hadits yang sedang diteliti yaitu hadits yang berbunyi لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ melalui penelusuran terhadap kamus hadits karangan A.J Wensinck yang berjudul *al-Mu, jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits*. Selain penelusuran terhadap kamus tersebut juga dipergunakan program CD *Room Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (Global Islamic Software Company).

3. Metode Takhrij Hadits

Takhrij adalah menunjukkan tempat pada sumber aslinya di mana hadits tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya apabila diperlukan.¹² Metode takhrij dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk menelusuri suatu hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan. Abu Muhammad Abdul Mahdi menyebutkan bahwa metode takhrij ada lima macam, diantaranya:

1. Takhrij menurut lafal pertama hadits,
2. Takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadits,
3. Takhrij menurut perawi terakhir,
4. Takhrij menurut tema hadits, dan
5. Takhrij menurut klasifikasi jenis hadits¹³

Dari kelima metode tersebut, yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode takhrij menurut lafal-lafal yang terdapat dalam hadits, dengan bantuan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras*, yang terkait dengan hadits-hadits tentang wali.

4. Pendekatan Data

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode *syarh hadits*, dan bukan penelitian yang lebih menitik beratkan seputar

¹² Mahmud at-Thahan, *Metode Takhrij Hadits dan Penelitian Sanad Hadits*, Pent. Ridwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 5

¹³ Abu Muhammad Abdul Mahdi, *Metode Takhrij Hadits*, Pent. Agil Husain Munawar, Ahmad Rifki Mukhtar, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 15

sanad dan matan hadits, namun lebih memfokuskan pada penjelasan uraian isi dan kandungan sebuah hadits.

Dalam bahasa arab, *syarh* adalah bentuk mashdar dari asal – شرح – يشرح¹⁴ yang berarti membuka dan menjelaskan, artinya sebuah penelitian yang menguraikan sesuatu dan memisahkan bagian sesuatu dari bagian yang lainnya. Pada kalangan para penulis kitab berbahasa arab, *syarh* adalah memberi catatan dan komentar terhadap naskah atau matan suatu kitab.¹⁵

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *syarh* tidak hanya terbatas pada penjelasan naskah kitab yang berkutat pada eksplanasi saja, melainkan juga uraian dalam arti interpretasi. Oleh karena itu, *syarh* juga dapat berupa uraian dan penjelasan tentang suatu kitab secara keseluruhan, atau merupakan uraian sebagian kitab, bahkan uraian terhadap suatu kalimat dari sebuah hadits. Istilah *syarh kitab* dimaksudkan sebagai suatu uraian atau penjelasan satu kitab secara keseluruhan. Apabila dikatakan *syarh hadits* secara mutlak, maka yang dimaksud adalah *syarh* terhadap ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah SAW (Hadits) beserta sanadnya,¹⁶ yang dalam penelitian ini berupa hadits-hadits tentang wali.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab indonesia, (Yogyakarta: unit pengadaan buku-buku ilmiah keagamaan pondok pesantren Al_Munnawir, 1984), h. 771.

¹⁵ Arifuddin Ahmad. *Et. al.* "Kecenderungan Kajian Hadits di UIN Alauddin Makassar (*Tracer Study* terhadap Skripsi Mahasiswa Tahun 1994-2013)" *Journal Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2015), h. 249-266.

¹⁶ *Ibid.*

5. Metode Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis adalah suatu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan, serta menafsirkan data yang ada serta menginterpretasikan data yang ada. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang ada yaitu berupa hadis-hadits Nabi tentang wali dengan memakai lafadz لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ and mengklasifikasikan juga menafsirkannya.

b. Analisis Kontekstual

Analisis kontekstual adalah suatu metode yang menghasilkan atau memadukan perkembangan masa lampau, kini dan mendatang. Metode ini digunakan untuk data Al-Qur'an dan data hadits sebagai sentral dan terapan masa lampau, kini, dan masa yang akan datang.¹⁷ Sehingga kemudian makna yang tersirat dari ayat Al-Qur'an dan hadits berawal dari pengertian kontekstual.

Metode analisis kontekstual ini peneliti gunakan dalam memahami hadits-hadits tentang wali, karena bagaimanapun juga untuk memahami hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, baik mengenai asbabul wurudnya, kultur maupun *setting* sosialnya, kemudian peneliti

¹⁷ M. Nur Ikhwan, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*, (Semarang: Lubuk Karya, 2001), h. 69-70.

kaitkan pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan terhadap hadits dengan lafadz لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara penganalisisan terhadap suatu obyek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

Setelah peneliti memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan wali menurut hadits Nabi Muhammad SAW secara umum, kemudian disimpulkan melalui pengamatan lalu mengambil kesimpulan secara singkat, sehingga wali menurut hadits Nabi Muhammad SAW bisa tergambar dan terjawab sebagaimana mestinya.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 141

BAB II TEORI UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah dalam Islam

Wali dalam pernikahan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam fiqh Islam disebut dengan “*al-walayah*” (الْوَلَايَةُ), seperti kata (الضَّلَاةُ). Secara etimologis memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (الحُبَّة) dan pertolongan (نَشْرَةٌ). Hakikat dari (الْوَلَايَةُ) adalah (تَوَالَى الْأَمْرَ) (mengurus/menguasai sesuatu).¹

Ada beberapa pendapat tentang pentingnya wali sebagai syarat untuksahnya nikah menurut hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wali merupakan salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengemukakan bahwa wali merupakan sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134.

*berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*²

Disebutkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. Berdasarkan ayat di atas, Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah pernikahan. Pertimbangan yang rasional dan logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanitayang hendak menikah.³

Namun pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Alasan pendapat ini di antaranya yaitu hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dari Aisyah yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ خَبْرَةَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami sufyan, telah mengabarkan kepadakami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dariUrwah, dari Aisyah ia berkata: “Setiap wanita yang menikahtanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal (tiga kali) .apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apayang ia peroleh darinya,

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 38

³Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),h.218220.

*kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*⁴

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha seperti yang diformulasikan oleh Abdurrahman al- Jaziri, wali ialah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah hukumnya. Wali adalah ayah dan seterusnya. Sejalan dengan itu, menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁵

Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut dengan wali. Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapat dipahami mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah kemudian hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga bagian, yaitu *pertama* perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), *kedua* perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), dan *ketiga* perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsiwaf-mali*

⁴Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah* Versi 2.09, Juz V, h.477 no. 1784.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 69.

ma'an).⁶ Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, adalah perwalian yang berhubungan dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan atau masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta adalah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pemeliharaan, pengembangan dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta adalah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, serta hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁷

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi SAW
bersabda: “Tidak ada (tidak sah) Pernikahan kecuali dengan wali.”⁸

Pentingnya wali bagi perempuan dalam akad nikah selain karena merupakan perintah agama, juga disebabkan karena perempuan adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak dan telah disyariatkan oleh Tuhan serta mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan, dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina rumah tangga.

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.134-13.

⁷*Ibid*, h.135-136.

⁸Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah* versi 2.09, No.hadits1785, Juz V, h.478.

B. Syarat-Syarat Wali Nikah dalam Islam

Orang yang akan menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila wali tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hakim, maka perwaliannya tidak sah. Oleh karena itu persyaratan menjadi wali harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

1. Islam,
2. Baligh,
3. Berakal,
4. Laki-laki, dan
5. Adil.⁹

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, persyaratan menjadi wali yaitu:

1. Beragama Islam,
2. Baligh,
3. Berakal,
4. Tidak dipaksa,
5. Terang laki-lakinya,
6. Adil (bukan fasik),
7. Tidak sedang ihram haji atau umroh,
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah,
dan
9. Tidak rusak pikiran dan merdeka.¹⁰

⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinandan Hukum Perdata*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h.28.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan tentang perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat 4 agar orang yang menjadi wali harus sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik. Juga diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, namun apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.¹¹

Pada prinsipnya, dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada perbedaan yang mendasar. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah:

1. Orang yang mukallaf

Orang yang mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak-anak tidak sah untuk menjadi wali, karena faktor kedewasaan menjadi suatu ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.¹²

2. Muslim

Disyaratkan sebagai wali adalah seorang muslim apabila yang menikah itu orang muslim juga. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

¹⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, (Jakarta:1985, 1986), h.12.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 262.

¹²Abdurahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1986), Cet. 1, h.48.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
 مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ
 الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Ayat di atas sebagai landasan bahwa umat Islam jika ingin menikah atau menikahkan dilarang mengangkat wali yang bukan seorang muslim. Dengandemikian dapat dikatakan bahwa beragama Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah.

3. Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat perwalian, demikian merupakan pendapat dari seluruh ulama karena dianggap lebih sempurna, sedangkan perempuan dianggap memiliki kekurangan. Perempuan dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.¹³ Pernyataan tersebut memberikan pengertian bahwa wali nikah haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan.

¹³Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet.1, h.50.

4. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah orang yang tanggung jawab, karena orang yang menjadi wali harus orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila berarti tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali.

5. Adil (cerdas)

Adil yang dimaksud adalah berbuat adil, dan tidak fasik. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan adil adalah cerdas.¹⁴ Cerdas yang dimaksud ialah mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Uraian di atas memberikan suatu pengertian bahwa syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah Islam, dewasa, dan laki-laki. Tentang persyaratan yang lain seperti berakal dan adil, dapat diambil pengertian baligh karena baligh menunjukkan bahwa orang itu telah berakal dan muslim atau beragama Islam menunjukkan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil. Dengan demikian, tiga persyaratan tersebut pada dasarnya telah mencakupi lima persyaratan yang banyak dibahas dalam berbagai buku fiqh atau hukum Islam.

C. Macam-macam Wali Nikah dalam Islam

Mengenai masalah wali menurut ajaran hukum Islam hanya pihak perempuan saja yang memerlukan wali dalam melakukan pernikahan, di mana wali itu selalu orang laki-laki. Wali nikah ada empat macam, yaitu diantaranya Wali Nasab, Wali Hakim, Wali tahkim dan Wali Maula.

¹⁴Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.92.

a) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Terdapat perbedaan pendapat tentang urutan wali nasab di antara para ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian ini didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga yang terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik mengatakan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, lalu ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.¹⁵

Imam Syafi'i berpegang pada *ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *ashabah* seorang wanita, hal ini didasarkan atas hadits Umar r.a sebagai berikut yang artinya:

Artinya: "wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa".

Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali dekat (*aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*). Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ialah sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrab*nya non-muslim,
2. Apabila wali *aqrab*nya fasik,

¹⁵Thami , Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), h.95.

3. Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa,
4. Apabila wali *aqrabnya* gila, dan
5. Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.¹⁶

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemeritah untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu pernikahan.

Rasulullah SAW bersabda:

فَا السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: “Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

1. Kepala pemerintahan
2. Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dijadikan wali dari sebuah akad nikah jika dalam keadaan-keadaan berikut:

¹⁶*Ibid*, h.97.

1. Tidak ada wali nasab,
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*,
3. Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan,
4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui,
5. Wali *aqrabnya adlal*,
6. Wali *aqrabnya* berbelit-belit dan mempersulit,
7. Wali *aqrabnya* sedang ihram,
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.¹⁷

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. Perempuan yang belum baligh,
2. Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak seketu,
3. Tanpa seizin perempuan yang akan menikah, dan
4. Perempuan yang berada diluar daerah kekuasaannya.¹⁸

c) Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Orang yang bisa diangkat sebagai wali tahkim adalah orang lain yang disegani, terdandang, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam, adil dan laki-laki. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal

¹⁷*Ibid*, h. 97.

¹⁸*Ibid*, h. 98.

ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali tahkim. Caranya ialah kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri) mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah:

- (1) Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, si calon istri menjawab, “saya terima tahkim ini”.

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada,
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu, dan
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.¹⁹

d) Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²⁰

¹⁹*Ibid*, h. 98.

²⁰*Ibid*, h.101.

Adapun Imam Syafi'i berkata, "orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan kerelaan di antara keduanya.²¹

Wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggungjawab atas pernikahan yang dilaksanakan di atas perwaliannya, sehingga pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, ijabadalah wewenang wali semata-mata. Karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan, apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.²²

D. Kedudukan Wali Nikah dalam Islam

Dalam pernikahan, wali nikah merupakan rukun yang menentukan di mana wali adalah orang yang melakukan ijab qabul dalam akad pernikahan. Mengenai kedudukan wali yang merupakan keabsahan dalam suatu pernikahan, imam madzhab berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan "tiada nikah tanpa wali dan wali menjadi syarat sahnya". Imam Syafi'i pun berkata demikian.

²¹*Ibid*, h. 101.

²²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015), h.90.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, yaitu apabila seorang wanita melakukan nikahnya tanpa wali, sedangkan mempelai pria sebanding (*kufu*), maka diperbolehkan. Imam Abu Daud membedakan antara gadis dan janda, yaitu bagi anak gadis diperlukan adanya wali, sedangkan pada janda wali nikah tidak disyaratkan.²³ Juga bagi perempuan yang terhormat diperbolehkan juga mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga dalam hal ini menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka masalah kedudukan wali dalam pernikahan secara garis besar ada dua pendapat yaitu pendapat yang mensyaratkan adanya wali dan pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan Imam madzhab mengenai wali dalam pernikahan sebab dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasan wali dalam nikah, sah dan tidaknya pernikahan tanpa wali, pun begitu juga dalam hadits. Demikian dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan dua pendapat saja merupakan masalah yang diperselisihkan antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i, masing-masing berpendapat tersebut adalah:

- a. Pendapat Abu Hanifah yaitu tidak mensyaratkan adanya wali.
- b. Pendapat Imam Syafi'i yaitu mensyaratkan adanya wali.²⁴

²³Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*(Penerjemah Syaiful Imran), (Semarang : AsySyifa',1990), h.365.

²⁴*Ibid.*h. 365.

Kedua pendapat tersebut masing-masing telah disertai dengan dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadits serta argumentasi yang mendukungnya. Untuk lebih jelasnya maka akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali

Pendapat yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az Zuhri, yang berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa walisedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahan sah.

Mereka mengatakan bahwa wali itu menjadi syarat pernikahan berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Baqarah Ayat 234, yaitu :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)menanggukuhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.²⁵

Ayat diatas menurut Imam Abbu Hanifah dapat dijadikan suatu alasan dan dalil tentang kebolehan perempuan bertindak untuk menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan

²⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.38.

menikahkan yang disadarkan kepada wanita banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 230.²⁶

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)mengetahui”.²⁷

Mereka juga memiliki dasar dari hadits Rasulullah SAW yaitu,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Malik bin Anas memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Seorang gadis dimintai ijin untuk dirinya dan ijinnya adalah diamnya. (HR. Tirmidzi)

Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan seorang perempuan yang sudah dewasa tidak disyaratkan adanya wali. Dengan demikian syarat adanya wali dalam perkawinan tidak mutlak (tidak harus dipenuhi).

²⁶Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*(Penerjemah Syaiful Imran)....., h.367.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*....., h. 36.

2. Pendapat yang mensyaratkan adanya wali

Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pendapat ini menurut imam syafi'i dan juga Imam Malik, dan juga merupakan pendapat jumhur ulama.²⁸

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh kelompok ini yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.²⁹

Ayat di atas diperuntukkan kepada para wali, apabila mereka tidak memiliki hak untuk menjadi wali tentunya mereka juga tidak dilarang untuk menghalang-halangnya. Kecuali dalam hal ini menggunakan dasar Al-Qur'an serta juga menyatakan dari hadits Nabi SAW sebagai suatu argumentasi agar pendapatnya kuat.

Adapun dasar dari hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

²⁸Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*(Penerjemah Syaiful Imran....., h.368.

²⁹*Ibid*, h. 37.

Artinya: “*Dari Abu Burdah dari abu musa bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak ada (tidak sah) Pernikahan kecuali dengan wali.”*”³⁰

Pendapat ulama Syafi’iyah digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia, yaitu menjadikan wali dari pihak mempelai perempuan sebagai rukun pernikahan, dan wali harus laki-laki muslim yang telah akil baligh, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila kemudian wali berhalangan hadir pada saat pelaksanaan pernikahan, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.

E. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Kedudukan wali merupakan hal yang sangat penting, dimana ia merupakan rukun dari pernikahan yang juga akan mempengaruhi tentang sah tidaknya suatu akad. Oleh karena itu, penggunaan wali dalam hal ini hendaklah selektif agar pemakaian wali dapat dianggap tepat dan pernikahan dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Islam memberikan sebuah konsep dalam hak perwalian dengan merujuk skala prioritas, yaitu orang yang terdekat dengannya, misalnya ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki. Persyaratan dalam menentukan seorang wali diantaranya adalah diharuskan bagi seorang wali tersebut bergama Islam, karena selain Islam atau non-muslim dalam Al-Qur’an dilarang untuk menikahkan anak perempuannya atau menjadi wali dalam pernikahannya anaknya.³¹ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran Ayat 28:

³⁰Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah* versi 2.09, Juz 5, h.478.

³¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 218.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٦٨﴾

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi walidengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Ayat tersebut dengan tegas melarang bagi orang-orang Islam khususnya yang beriman yang akan menjadikan orang non-Islam sebagai wali nikah. Apabila terdapat seorang muslimah yang perwalian nikahnya diwakilkan oleh seorang fasiq atau kafir, maka hal tersebut akan menjadikan pernikahannya menjadi rusak. Dikarenakan diantara sahnya sebuah pernikahan itu adalah keharusan calon suami atau istri sama sama orang yang memiliki agama yang sama (Islam), begitu juga dalam hal perwalian dan kesaksian pernikahan.

Seorang bapak sangat diutamakan menjadi wali dalam pernikahan. Apabila tidak ada bapak, maka kakek yang menjadi wali. Apabila tidak ada kakek, maka yang menjadi wali adalah saudara laki-laki dari pihak bapak, atau saudara laki-laki seibu seapak, demikian seterusnya sampai dengan ke bawah. Yang diutamakan dalam hal perwalian disebut wali dekat (*wali aqrab*), misalnya saudara laki-laki seapak.

Saudara laki-laki seapak ini disebut dengan wali aqrab. Sedangkan wali-wali yang lain disebut dengan wali yang jauh atau wali *ab'ad*.³²

Menurut pandangan imam Syafi'i, pernikahan seorang perempuan dikatakan tidak sah apabila dinikahkan oleh wali *aqrab*. Kalau tidak ada wali *aqrab*, maka dinikahkan oleh wali yang jauh (*wali ab'ad*), kalau tidak ada juga maka dapat dinikahkan oleh penguasa (wali hakim).³³

Sedangkan menurut pandangan Imam Hanafi, hak untuk menjadi wali juga dinisbatkan kepada selain ashabah, misalnya paman dari pihak ibu, serta anak dari paman tersebut dan anaknya dari ibu (saudara laki-laki seibu).³⁴

F. Fungsi Wali dalam Islam

Dalam ajaran agama Islam, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam masalah pernikahan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan *aqil baligh*, maka ia memiliki hak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan perempuan, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak ia diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.³⁵

Suatu pernikahan menjadi sangat mungkin sebagai titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita dalam bersikap atau bertindak lebih sering mendahulukan perasaan dari pada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan suatu yang dapat menimbulkan kehinaan dirinya yang hal tersebut juga akan menimpa walinya.

³²*Ibid*, h. 219.

³³*Ibid*, h. 220.

³⁴*Ibid*.

³⁵M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet.Ke-2, h.39.

Oleh karena itu dalam hal pernikahan, anak perempuan haruslah dikuasakan kepada wali. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa seorang wali tidak mungkin berniat buruk yang akan mencelakakan dan menghinakannya.³⁶

Di samping itu dalam prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab atau penawaran, sedangkan pengantin laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul atau penerimaan. Karena perempuan pada fitrahnya adalah pemalu, maka dalam pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam hal pernikahan adalah menikahkan pihak perempuan.³⁷

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid*, h. 40.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Wensinck, guru besar bahasa arab di Univeritas Leiden-Belanda. Kemudian beberapa orientalis bergabung dalam penulisannya diantaranya: Dr, Y. B. Mensink, pengajar bahasa arab di Universitas Leiden. W. B. De Hass, Y. B. Van Loen, Y. T. B. De Brown, Y. Brochman, dan Syeikh Muhammad Fuad Abdul Baqi'. Lihat: Abdul Malik Ghazali, *Pola Interaksi Hadits Nabi*, Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Lampung, 2011.
- Abdul Mahdi dan Abu Muhammad, *Metode Takhrij Hadits*, Pent. Agil Husain Munawar, Ahmad Rifki Mukhtar, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdul Majid, Khon, *Tahrij dan metode memahami hadist*, Jakarta: Amzah, 2014, Abdurahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986.
- Abdurrahman, al-Jaziry, *al-Fiqhu `ala al-Madzâhib al-'Arba'ah*, Vol. IV, Kairo: Muassissatul al-Mukhtâr, 2000.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN, 2015.
- Abu al-U'la Muhammad Abdurrahman Ibn Abdirrahim al-Mubarakfuri, *Tuhfatu al-Ahwadi Bi Syarh Jami, at-Tirmidzi*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Abu Thayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Adzhim Abadi, *Aun al-Ma'bud Bi Syarh Sunan Abu Dawud*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), Juz IV, h. 475 atau lihat juga, Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad al-Khatâbi al-Busti, *Ma'alim as-Sunan Syarh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Ahmad Arifuddin. *Et. al.* "Kecenderungan Kajian Hadits di UIN Alauddin Makassar (*Tracer Study* terhadap Skripsi Mahasiswa Tahun 1994-2013)" *Journal Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al- Hakim Abu 'Abdullah an-Naisaburi, *Ma'rifah Uhum al-Hadits*, Kairo-Mesir: Maktabah al-Mutannabi, t.th, Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al- Sunnah*.
- Alam, Syariful, *Sejarah Penindasan Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

Alaudin bin Bakr al-Kasani al-Hanafi, *Badai Sanai Fi Tartibi Syara'i*, cet. II, Beirut: Darul al-Ilmiyah, 1986.

al-Ghulayaini Musthafa, *Jami' ad-Durus al-A'rabiyyah*, Vol. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2005.

al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan.

Ali Muhamad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi*, (Bandung: Angkasa, 1993).

Al-shabuni, Muhammad Ali, *Tafsiru Ayat Al-Ahkam*, Juz, 1 Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

an-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Syaraf, *Syarah an-Nawawi*, Juz. IV, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1996.

at-Thahan Mahmud, *Metode Takhrij Hadits dan Penelitian Sanad Hadits*, Pent. Ridwan Nasir, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Ayyub, Syekh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.

Dalam riwayat Tirmidzi, hadits di atas terulang satu kali pada urutan hadits ke - 1101. Lihat: Abu Isa Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, di tahqiq oleh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Riyadh: Darussalam, 1999.

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah* versi 2.09, Juz 5.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2011.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam*, Jakarta: 1985.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadits di atas terulang dua kali masing-masing pada urutan ke-1880 dan 1881 dalam Bab Nikah (15). Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Libanon: Dar al-Fikr, 2004.

Hadits tersebut terulang kali dalam urutan hadits di atas terulang satu kali dalam urutan hadits yang ke -2085 pada Bab Nikah (19). Lihat: Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II, Libanon: Dar al-Fikr, 2003.

Ikhwan, M. Nur, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*, Semarang: Lubuk Karya, 2001.

Ismail Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa, 1994.

Izutsu, Toshihiko, Eticho-Religious Consept in the Qur'an", Diterjemahkan oleh Agus Fakhri Husain, *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Kamil, Muhammad Syekh, 'Uwaidah, Fiqh Wanita terj. M Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar cet. 10, 2002.

M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th.

M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits, tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, Lokal*, Jakata: Bulan Bintang, 1994.

M.M Azami, *Memahami Ilmu Hadits*, Jakata, Penerbit Lentera, 2003.

Mahmud Al-Nasafy, Abdullah bin Ahmad bin, *Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil*, juz II, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2001.

Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Moh. Fauzi Umma, "Perempuan sebagai Wali Nikah, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Gender dalam pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gamma Media, 2002.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera. 2001.

Muhammad Fuad ' Abd al-Baqi, Juz. VI,(Brill: Leiden, Maktabah Barl, 1936), h. 556. Penelusuran terhadap hadits juga diperoleh melalui program CD *Mausu'ah al-Hadits an-Nabawi*.

- Muhtar, Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Arab indonesia*, Yogyakarta: unit pengadaan buku-buku ilmiah keagamaan pondok pesantren Al_Munnawir, 1984.
- Peter Salim danYenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Porwadarmenta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qudamah Ibnu, *al-Mughni*, Juz VII Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewearisan, Hukum AcaraPeradilan Agama Dan Zakat*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawin an Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* (Penerjemah Syaiful Imran), (Semarang : Asy Syifa“, 1990), h. 365.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Kairo: Dar al-Fikr, 1995.
- Shadili Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ich Tiar Baru Van Hove, 1984.
- Shalah ad-Din Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1972.
- Soebahar ,Erfan, *Menguak Fakta Keabsahan al- Sunnah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II, Libanon: Dar al-Fikr, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumbullah, Umi, “ *Problematika Gender*”, dalam Umi Sumbullah, dkk., *Spektrum Gender*, Malang: UIN Press, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Thami , Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramidana, 2001.

Wajidi Farid, dan Cici Farikha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.

Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.

Yahya, M. Zulkani, *Teologi al-Ghazali: Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YYP, 1972 Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zahrah Abu, *Muhadarat fiy 'Aqd al-Ziwaj wa Asaruh* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.